



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IQBAL AKBARUDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 220776

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.535.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/119 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPAND1.5L ULT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RXK 135 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, YAMAHA RXK 135 Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 517.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 152.514.506

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.409.514.506

III. HUTANG Rp. 1.677.725.262

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.731.789.244

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.